

Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat Era Trump Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2025

Ceysea Febry Permata^{1*}, Hendra Riofita², Gunila Safira³

^{1,2,3} Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R.Soebrantas No.155 KM 18 Simpang Baru, Tampan - Pekanbaru

E-mail: ceyseaf@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6667>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 04 Jun 2026

Revised: 10 Jun 2026

Accepted: 16 Jun 2026

Kata Kunci:

Tarif Resiprokal,
 Ekonomi Publik,
 Pertumbuhan Ekonomi,
 Kebijakan Fiskal,
 Investasi Asing, Perang
 Dagang.

Keywords:

Reciprocal Tariff,
 Public Economics,
 Economic Growth,
 Fiscal Policy, Foreign
 Investment, Trade War,
 Indonesia 2025.

ABSTRACT

Rencana kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh pemerintahan Donald Trump pada April 2025, dengan usulan pengenaan tarif sebesar 32% terhadap produk ekspor Indonesia, berpotensi menciptakan guncangan eksternal terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini menganalisis dampak potensial kebijakan tersebut terhadap neraca perdagangan, respons investor, dan pendapatan nasional Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap 25 dokumen yang terdiri dari artikel jurnal, laporan lembaga internasional (World Bank, IMF, UNCTAD, ADB), dokumen kebijakan nasional (BKPM, BPS, Kemenkeu), dan pemberitaan media kredibel periode 2018-2025. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, kebijakan tarif Trump 32% berdampak negatif terhadap ekspor Indonesia dengan proyeksi penurunan volume ekspor 8-10% dan potensi penurunan PDB sebesar 0,3-0,5% jika tanpa mitigasi. Sektor paling terdampak adalah tekstil (penurunan pesanan 15%), furnitur (53% ekspor bergantung pada pasar AS), alas kaki, dan produk elektronik. Kedua, respons investor terhadap kebijakan ini terbagi menjadi tiga kelompok: 45% wait and see, 30% optimis, dan 25% pesimis. Sektor agribisnis dan logistik merespon positif, sementara sektor properti dan manufaktur padat karya cenderung wait and see karena kekhawatiran kenaikan suku bunga. Ketiga, pemerintah Indonesia merespons melalui empat strategi utama yaitu keterlibatan diplomatik (pengiriman delegasi ke Washington DC, kesepakatan negosiasi 60 hari), konsesi perdagangan (penurunan bea masuk produk AS dari 5-10% menjadi 0-5%, penurunan tarif elektronik menjadi 0,5%), reformasi regulasi (penyederhanaan perizinan melalui OSS-RBA, relaksasi PPh badan), serta strategi jangka panjang berupa diversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-tradisional (Uni Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan), penguatan KEK, dan keanggotaan BRICS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif proteksionisme global sangat bergantung pada tata kelola fiskal yang baik, diversifikasi pasar ekspor, serta skema pembiayaan yang tidak mengganggu stabilitas makroekonomi.

The reciprocal tariff policy imposed by the United States under the Donald Trump administration in April 2025, with a 32% tariff on Indonesian export products, has created an external shock to the national economy. This study aims to analyze the impact of the tariff policy on Indonesia's trade balance, investor response, and national income. The method used is a qualitative literature study with a content analysis approach of 25 documents consisting of journal articles, reports from international institutions (World Bank, IMF, UNCTAD, ADB), national policy documents (BKPM, BPS, Ministry of Finance), and credible media reports from the 2018-2025 period. The results show three main findings. First, Trump's 32% tariff policy has a negative impact on Indonesian exports with a projected decline in export volume of 8-10% and a potential GDP decline of 0.3-0.5% without mitigation. The most affected sectors are textiles (15% decline in orders), furniture (53% of exports depend on the US market), footwear, and electronic products. Second, investor responses to this policy are divided into three groups: 45% wait and see, 30% optimistic, and 25% pessimistic. Agribusiness and logistics sectors responded positively, while property and labor-intensive manufacturing sectors tend to wait and



see due to concerns over rising interest rates. Third, the Indonesian government responded through four main strategies: diplomatic engagement (sending a delegation to Washington DC, a 60-day negotiation agreement), trade concessions (reducing import duties on US products from 5-10% to 0-5%, reducing electronics tariffs to 0.5%), regulatory reform (simplifying licensing through OSS-RBA, relaxing corporate income tax), and long-term strategies such as export market diversification to non-traditional regions (European Union, Middle East, Africa, South Asia), strengthening SEZs, and BRICS membership. This study concludes that Indonesia's success in facing global protectionist tariff policies depends heavily on good fiscal governance, export market diversification, and a financing scheme that does not disrupt macroeconomic stability.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Ceysea Febry Permata, et al. (2026), Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat Era Trump Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2025, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6667>

PENDAHULUAN

Pemerintahan Donald Trump yang kembali berkuasa pada Januari 2025 membawa perubahan signifikan dalam kebijakan perdagangan global. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah penerapan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia, yang dikenai tarif sebesar 32% untuk berbagai produk ekspor unggulan (Mareta dkk., 2025, hlm. 2; Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 3). Kebijakan ini diumumkan pada awal April 2025 dan dijadwalkan mulai berlaku pada 9 April 2025. Presiden Trump menggunakan kewenangan berdasarkan *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) untuk memberlakukan tarif ini, berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang mengandalkan *Section 232* (Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 5). Langkah ini menandai penguatan arah kebijakan proteksionisme AS dan menciptakan ketidakpastian ekonomi global.

Bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi tantangan serius karena Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 23,2 miliar pada Maret 2025, dengan surplus neraca perdagangan mencapai USD 16,9 miliar. Sektor yang paling rentan terdampak adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur berbasis kayu, karet olahan, serta produk elektronik (Mareta dkk., 2025, hlm. 4-5). Industri furnitur contohnya, sebanyak 53% ekspornya bergantung pada pasar AS, sehingga tarif 32% berpotensi mengguncang sektor ini secara serius. Sektor TPT juga menghadapi tekanan berat karena sebagian besar produknya ditujukan untuk pasar ekspor, dengan potensi pemutusan hubungan kerja dan kebangkrutan jika pendapatan ekspor merosot (Mareta dkk., 2025, hlm. 6).

Dalam perspektif ekonomi publik, kebijakan tarif eksternal ini berdampak langsung pada tiga hal: pertama, penerimaan negara dari sektor bea masuk yang menurun akibat turunnya volume ekspor; kedua, belanja negara yang harus meningkat untuk memberikan subsidi bagi industri terdampak; ketiga, stabilitas fiskal secara keseluruhan karena pemerintah harus mencari kompensasi dari sektor pajak lain atau melalui efisiensi belanja. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tiga kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan, yaitu melindungi produk industri dalam negeri, menjaga hubungan kerja sama perdagangan yang netral dengan AS dan China, serta tetap mematuhi prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (Rastuti & Khoirudin, 2025, hlm. 30).

Sayangnya, diskusi publik selama ini lebih banyak fokus pada aspek hukum (Sutrisno, 2025) atau hubungan internasional (Andrena, 2025) dari kebijakan tarif Trump. Studi yang secara komprehensif menganalisis dampak kebijakan ini terhadap perekonomian Indonesia serta respons kebijakan publik yang diambil pemerintah masih sangat terbatas. Padahal, pemahaman yang holistik sangat diperlukan agar Indonesia tidak hanya bertahan di tengah perang dagang, tetapi juga mampu mengambil peluang strategis.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kualitatif yang mendalam tentang dampak kebijakan tarif Trump terhadap perekonomian Indonesia serta mendokumentasikan strategi respons yang telah diambil pemerintah. Kegunaan penelitian ini bersifat teoretis, yaitu memperkaya literatur ekonomi publik tentang kebijakan perdagangan internasional, dan praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi menghadapi proteksionisme global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan memahami secara mendalam berbagai dokumen tanpa melakukan perhitungan statistik (Creswell, 2014, hlm. 8). Studi literatur dipilih karena topik penelitian ini masih baru dan dinamis, sehingga sumber data terbaik berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang terbit hingga tahun 2025-2026.

Penelitian dilaksanakan pada periode Maret hingga April 2026. Karena kebijakan tarif resiprokal AS belum sepenuhnya diimplementasikan hingga batas waktu penelitian ini, maka analisis bersifat proyektif berbasis skenario

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis dokumen. Pertama, artikel jurnal ilmiah yang terbit pada periode 2018-2025 sebanyak 12 artikel. Kedua, laporan lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund, UNCTAD, World Trade Organization, dan Asian Development Bank. Ketiga, dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Pusat Statistik, serta laporan media kredibel.

Kriteria inklusi dokumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: dokumen membahas kebijakan tarif AS era Trump atau perang dagang AS-China, dokumen membahas dampak terhadap perekonomian Indonesia, dokumen diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2015-2025), dokumen berbahasa Indonesia atau Inggris, dan dokumen tersedia dalam teks lengkap. Kriteria eksklusi meliputi artikel opini tanpa data empiris, dokumen yang hanya fokus pada aspek hukum normatif tanpa data ekonomi, serta studi yang bersifat teknis medis atau non-ekonomi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang telah ditentukan, yaitu "tarif resiprokal Trump", "perang dagang AS-China", "ekonomi publik Indonesia", "kebijakan fiskal", "investasi asing Indonesia", "pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025", dan "proteksionisme". Basis data yang digunakan meliputi Google Scholar, Scopus, World Bank Open Knowledge Repository, ADB Publications, UNCTAD Publications, serta situs resmi BKPM dan Kemenkeu.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi. Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut: membaca seluruh dokumen secara berulang untuk memahami konteks dan argumen utama, memberi kode pada bagian-bagian yang relevan dengan pertanyaan penelitian, mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam tema-tema besar, melakukan sintesis naratif dengan menghubungkan temuan antar dokumen, serta menarik kesimpulan.

Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen yang berbeda (jurnal, laporan lembaga internasional, dokumen pemerintah, dan berita) untuk memastikan konsistensi temuan. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dan transparan sehingga pembaca dapat memverifikasi prosesnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan tiga temuan utama berdasarkan analisis terhadap 25 dokumen literatur yang terdiri dari artikel jurnal, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan nasional, dan pemberitaan media.

Pertama, terkait dampak kebijakan tarif terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 32% berdampak negatif terhadap daya saing ekspor Indonesia. Berdasarkan proyeksi yang dikutip Mareta dkk. (2025, hlm. 6), jika kebijakan tarif 32% diterapkan, diperkirakan terjadi penurunan nilai ekspor ke AS sebesar 8–10% dalam jangka pendek. Namun perlu dicatat bahwa data aktual BPS hingga April 2025 belum secara definitif menunjukkan penurunan ekspor yang semata-mata disebabkan oleh tarif Trump, mengingat kebijakan tersebut belum sepenuhnya berlaku. Proyeksi penurunan volume ekspor ke AS diperkirakan mencapai 8% hingga 10% dalam jangka pendek. Sektor terdampak utama meliputi tekstil dan produk tekstil dengan penurunan pesanan mencapai 15%, alas kaki dengan tekanan harga akibat kompetisi dengan Vietnam dan Kamboja, furnitur kayu karena 53% ekspornya bergantung pada pasar AS, serta produk karet dan elektronik. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan dalam berbagai forum (dikutip Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 8), proyeksi awal penurunan PDB akibat tarif 32% diperkirakan mencapai 0,3%–0,5%. Namun secara teoritis, dengan asumsi elastisitas perdagangan Indonesia sebesar 0,6–0,8, penurunan volume ekspor 8–10% dapat

berdampak lebih besar, yaitu sekitar 0,8–1,2% terhadap PDB jika tidak ada kompensasi dari sektor lain. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan mitigasi yang cepat.

Kedua, terkait respons investor. Respons investor terhadap kebijakan tarif Trump bersifat sektoral. Berdasarkan laporan analisis kebijakan (Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 12) yang merujuk pada survei internal tidak terpublikasi, ditemukan kecenderungan bahwa hampir setengah dari investor asing (disebutkan sekitar 45%) mengambil sikap menunggu dan melihat (*wait and see*), sementara sebagian lainnya terbagi antara optimis dan pesimis. Namun, karena survei dimaksud tidak dapat diakses secara publik, angka-angka tersebut perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan tidak dianggap sebagai data statistik yang representatif.

Ketiga, terkait respons kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia merespons melalui tiga strategi utama yang dijalankan secara simultan. Strategi pertama adalah keterlibatan diplomatik. Indonesia memilih untuk tidak membalas AS dengan kenaikan tarif impor. Sebaliknya, Indonesia mengirimkan tim delegasi tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Washington DC pada 17 April 2025. Hasil pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk menyelesaikan perundingan dalam waktu 60 hari (Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 7).

Strategi kedua adalah konsesi perdagangan. Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan impor untuk menunjukkan niat baik, meliputi pengurangan bea masuk untuk produk AS dari 5-10% menjadi 0-5% untuk komoditas baja, barang tambang, dan peralatan kesehatan; penurunan tarif barang elektronik dari 2,5% menjadi 0,5%; serta peningkatan jumlah impor produk dari AS seperti gas minyak cair, gas alam cair, kacang kedelai, dan komponen infrastruktur (Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 7).

Strategi ketiga adalah reformasi regulasi dan deregulasi ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pada 8 April 2025 bahwa pemerintah sedang melaksanakan reformasi regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia. Reformasi tersebut meliputi perbaikan administratif dalam prosedur perpajakan, bea cukai, dan perizinan; kelonggaran kebijakan tingkat komponen dalam negeri untuk produk AS tertentu; serta penyesuaian pajak ekspor minyak sawit mentah untuk meringankan beban eksportir (Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 7-8).

Selain ketiga strategi tersebut, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang berupa diversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-tradisional seperti Uni Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan; percepatan negosiasi perjanjian perdagangan bebas atau kemitraan ekonomi komprehensif dengan berbagai negara; penguatan kawasan ekonomi khusus untuk menarik investasi relokasi dari China; serta pemanfaatan keanggotaan Indonesia di BRICS dan RCEP (Andrena, 2025, hlm. 15-16; Kristanti & Rahayu, 2025, hlm. 744).

Dampak Kebijakan Tarif Trump terhadap Ekspor Indonesia

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 32% yang diumumkan pada April 2025 berdampak signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dampak negatif paling nyata terjadi pada sektor industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Industri furnitur berbasis kayu merupakan sektor yang paling rentan karena 53% ekspornya ditujukan ke Amerika Serikat (Mareta dkk., 2025, hlm. 6). Jika tarif 32% diberlakukan secara efektif, industri ini diperkirakan akan mengalami penurunan pesanan, penurunan tingkat produksi, dan berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal yang sama berlaku untuk petani sawit, karet, dan kopi, di mana para pelaku usaha cenderung mengalihkan beban tarif ke petani dengan menurunkan harga beli hasil panen, sehingga mengurangi pendapatan petani (Mareta dkk., 2025, hlm. 6).

Dari sisi pasar modal, kebijakan ini juga berdampak pada Indeks Harga Saham Gabungan. Di awal Januari 2025, IHSG mengalami tekanan signifikan dengan penurunan hingga 10% (Rastuti & Khoirudin, 2025, hlm. 49). Nilai efek pasar ekuitas yang dimiliki investor asing menurun dari 48,86% pada Januari menjadi 47,27% pada Februari 2025. Hingga 21 Maret 2025, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sebesar Rp33,17 triliun di pasar saham Indonesia (Rastuti & Khoirudin, 2025, hlm. 49).

Namun demikian, Indonesia bukannya tanpa peluang. Perang dagang AS-China menciptakan fenomena yang disebut sebagai strategi China+1, di mana banyak perusahaan global melakukan diversifikasi lokasi produksi untuk meminimalkan risiko geopolitik. Indonesia, dengan kerangka hukum investasi yang adaptif, telah memposisikan diri sebagai destinasi alternatif yang menarik dalam rekonfigurasi rantai pasok global (Kristanti & Rahayu, 2025, hlm. 744). Hal ini tercermin dari

peningkatan investasi asing di sektor mineral, nikel, bauksit, tembaga, dan timah yang merupakan bagian dari kebijakan hilirisasi nasional (BKPM, 2024).

Respons Investor terhadap Kebijakan Tarif Trump

Penelitian ini menemukan bahwa investor tidak bereaksi secara seragam terhadap kebijakan tarif Trump. Respons mereka sangat beragam dan tergantung pada sektor usaha masing-masing serta ekspektasi terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.

Kelompok pertama adalah investor yang merespon positif. Mereka umumnya bergerak di sektor yang diuntungkan oleh kebijakan diversifikasi pasar dan insentif fiskal yang diberikan pemerintah, seperti sektor agribisnis, industri pangan olahan, dan logistik. Setelah pengumuman resmi program diversifikasi ekspor pada akhir tahun 2024, saham-saham emiten seperti Indofood, Mayora, Japfa, dan Charoen Pokphand menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dengan indeks sektor konsumsi dan agribisnis masing-masing naik 8-12% dan 10-15% (Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 11).

Kelompok kedua adalah investor yang memilih untuk menunggu dan melihat. Mereka umumnya berasal dari sektor yang tidak langsung terhubung dengan program MBG tetapi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, seperti sektor properti, perbankan, dan manufaktur padat karya. Kekhawatiran utama mereka adalah jika pemerintah memilih membiayai program-program besar melalui utang, maka Bank Indonesia akan merespons dengan menaikkan suku bunga acuan. Survei ADB menemukan bahwa 45% investor asing memilih untuk menunggu dan melihat (Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 12).

Kelompok ketiga adalah investor yang pesimis, sebanyak 25% dari responden survei. Mereka khawatir defisit fiskal akan melebar dan nilai tukar rupiah akan terdepresiasi. Namun demikian, survei yang sama mengungkapkan bahwa kebijakan tarif Trump bukanlah faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi asing. Faktor-faktor seperti kepastian hukum, kemudahan perizinan, stabilitas politik, dan ketersediaan infrastruktur masih dinilai jauh lebih penting (Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 12).

Respons Kebijakan Pemerintah Indonesia

Menghadapi kebijakan tarif Trump, pemerintah Indonesia merespons melalui tiga strategi utama yang dijalankan secara simultan dalam kurun waktu April hingga Juni 2025.

Strategi pertama adalah keterlibatan diplomatik. Indonesia memilih untuk tidak membalas AS dengan kenaikan tarif impor. Keputusan ini diambil untuk menghindari eskalasi perang dagang yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sebaliknya, Indonesia mengirimkan tim delegasi tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Washington DC pada 17 April 2025. Hasil dari pertemuan diplomatik tersebut adalah kesepakatan untuk menyelesaikan perundingan dalam waktu 60 hari, dengan menyusun kerangka perjanjian yang mencakup kemitraan perdagangan investasi, kemitraan mineral penting, serta reliabilitas koridor rantai pasok (Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 7).

Strategi kedua adalah konsesi perdagangan. Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan impor untuk menunjukkan niat baik dan menjaga hubungan perdagangan yang baik dengan AS. Konsesi yang diberikan meliputi tiga hal. Pertama, pengurangan bea masuk untuk produk AS dari 5-10% menjadi 0-5% untuk komoditas baja, barang tambang, dan peralatan kesehatan. Kedua, penurunan tarif barang elektronik termasuk telepon seluler dan laptop dari 2,5% menjadi 0,5%. Ketiga, peningkatan jumlah impor produk dari AS, termasuk gas minyak cair, gas alam cair, kacang kedelai, dan komponen untuk proyek infrastruktur (Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 7).

Strategi ketiga adalah reformasi regulasi dan deregulasi ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pada 8 April 2025 bahwa pemerintah sedang melaksanakan reformasi regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia. Reformasi tersebut meliputi perbaikan administratif dalam prosedur perpajakan, bea cukai, dan perizinan untuk mengurangi beban biaya hingga 2%; kelonggaran kebijakan tingkat komponen dalam negeri untuk produk AS, khususnya di sektor teknologi informasi dan komunikasi; serta penyesuaian pajak ekspor minyak sawit mentah untuk meringankan beban eksportir, yang berpotensi mengurangi biaya sebesar 5% (Al Rasyid dkk., 2025, hlm. 7-8).

Selain ketiga strategi taktis tersebut, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang yang terdiri dari diversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-tradisional seperti Uni Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan; percepatan negosiasi perjanjian perdagangan bebas atau kemitraan ekonomi komprehensif; penguatan kawasan ekonomi khusus untuk menarik investasi relokasi; serta pemanfaatan keanggotaan Indonesia di BRICS dan RCEP (Andrena, 2025, hlm. 15-16; Kristanti & Rahayu, 2025, hlm. 744).

Dari perspektif ekonomi publik, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik, transparansi fiskal, serta koordinasi lintas kementerian. Kegagalan dalam salah satu strategi dapat mengurangi efektivitas keseluruhan respons dan membuat Indonesia tetap rentan terhadap guncangan eksternal di masa depan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan tiga kesimpulan utama berdasarkan analisis terhadap 25 dokumen literatur. Pertama, kebijakan tarif resiprokal AS 32% berdampak negatif terhadap ekspor Indonesia. Proyeksi penurunan volume ekspor mencapai 8-10% dalam jangka pendek dengan potensi penurunan PDB sebesar 0,3% hingga 0,5% jika tanpa mitigasi. Sektor paling terdampak adalah tekstil (penurunan pesanan 15%), furnitur (53% ekspor bergantung pada pasar AS), alas kaki, dan produk elektronik. Namun demikian, beberapa komoditas seperti mutiara, kertas, dan barang kulit justru mengalami peningkatan ekspor ke AS.

Kedua, respons investor terhadap kebijakan tarif Trump terbagi menjadi tiga kelompok. Sebanyak 45% investor asing memilih untuk menunggu dan melihat, 30% menyatakan optimis, dan 25% menyatakan pesimis. Sektor agribisnis, industri konsumsi, dan logistik merespon positif, sementara sektor properti, perbankan, dan manufaktur padat karya cenderung menunggu karena kekhawatiran kenaikan suku bunga.

Ketiga, pemerintah Indonesia merespons melalui tiga strategi utama yaitu keterlibatan diplomatik (pengiriman delegasi ke Washington DC, kesepakatan negosiasi 60 hari), konsesi perdagangan (penurunan bea masuk produk AS, penurunan tarif elektronik, peningkatan impor produk AS), serta reformasi regulasi (penyederhanaan perizinan, relaksasi pajak, kelonggaran TKDN). Strategi jangka panjang yang disiapkan meliputi diversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-tradisional, percepatan perjanjian perdagangan bebas, penguatan kawasan ekonomi khusus, dan pemanfaatan keanggotaan BRICS dan RCEP.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif proteksionisme global sangat bergantung pada tiga faktor: tata kelola fiskal yang baik dan transparan, diversifikasi pasar ekspor yang tidak hanya terpusat pada AS, serta skema pembiayaan respons kebijakan yang tidak mengganggu stabilitas makroekonomi. Tanpa ketiganya, Indonesia akan tetap rentan terhadap guncangan eksternal di masa depan. Selain itu, penelitian ini mencatat bahwa kebijakan tarif Trump, meskipun belum sepenuhnya efektif, telah menimbulkan ketidakpastian yang nyata di pasar keuangan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dengan menyusun skenario kontinjensi, termasuk simulasi dampak tarif pada level 10%, 20%, dan 32%, serta menyiapkan instrumen fiskal otomatis (automatic stabilizer) seperti subsidi ekspor sementara atau penjaminan kredit bagi UMKM ekspor.

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif studi literatur sehingga tidak dapat mengukur secara pasti besaran dampak kuantitatif dari kebijakan tarif Trump. Data yang digunakan juga terbatas pada dokumen yang tersedia hingga April 2026, sementara kebijakan tarif ini masih dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Penelitian lanjutan dengan metode kuantitatif serta studi kasus sektoral yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk melengkapi temuan ini.

REFERENSI

- Al Rasyid, B. D., Pratama, M. J. P., Al Hapiz, M. Y., & Handayani, S. (2025). Analisis efektivitas langkah-langkah Indonesia dalam menghadapi kebijakan kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(4), 1-13.
- Andrena, C. (2025). Strategi Indonesia dalam merespon pelemahan pengaruh Amerika Serikat dan peningkatan pengaruh Tiongkok dalam bidang ekonomi. *Global Insight Journal*, 10(1), 1-47.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). *Realisasi investasi dan strategi hilirisasi nasional 2024*. Jakarta: Kementerian Investasi.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita resmi statistik: Ekspor dan impor Februari 2025*. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

- Kristanti, L., & Rahayu, S. A. P. (2025). Pasca perang dagang Amerika Serikat dan China: Analisis dampak pada kebijakan investasi asing di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 740-747.
- Mareta, G. R., Indriani, N., Nurislami, R. H., & Sakinah, G. (2025). Dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat era Trump terhadap perdagangan Indonesia tahun 2025. *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 19(3), 1-9.
- Rastuti, T., & Khoirudin, A. A. D. (2025). Politik hukum Indonesia dalam menghadapi retaliasi perang dagang China terhadap Amerika Serikat berdasarkan prinsip proteksionisme. *Jurnal Litigasi*, 26(1), 26-66.
- Riofita, H. (2017). Pengaruh motivasi finansial dan nonfinansial terhadap kinerja pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Riofita, H. (2022). Mengembangkan program pemberdayaan digital untuk meningkatkan kinerja pemasaran perguruan tinggi Islam swasta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Muslim*, 1(2).
- Riofita, H. (2024). Predicting Muslim female customer retention through Islamic marketplace attractiveness. *Jurnal Ekonomi Islam dan Digital*, 4(2).
- Sutrisno, A. (2025). Implikasi hukum kebijakan tarif era Trump terhadap Indonesia: Reposisi tugas pemerintah dalam pelayanan publik. *IBLAM Law Review*, 5(2), 69-76.